



Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Untuk Belanja Satker KPPN Padang

Dian Pramudita Sari*, Rahmadhona Fitri Helmi

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat adopsi KKP, ditandai dengan belum optimalnya satuan kerja yang mengadopsi KKP sebagai alat pembayaran melalui penggunaan Uang Persediaan (UP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima satuan kerja sebagai objek penelitian, terdiri dari tiga satuan kerja yang telah menggunakan KKP dan dua satuan kerja yang belum mengadopsi KKP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003) dengan fokus pada karakteristik inovasi, yaitu *relative advantages*, *compatibility*, *complexity*, *trialability* *observability*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi KKP di lingkungan KPPN Padang masih bervariasi. Satuan kerja yang telah mengadopsi KKP umumnya memiliki dukungan pimpinan dan pemahaman teknis yang baik, sementara satuan kerja yang belum mengadopsi masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan persepsi terhadap kerumitan prosedur. Faktor pendukung utama adopsi meliputi dukungan sosialisasi dan bimtek dari KPPN, dorongan kebijakan, persepsi positif satker terhadap kemudahan proses pembayaran. Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan *merchant* ber-EDC, sumberdaya manusia, budaya organisasi, efisiensi anggaran, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem tunai ke non-tunai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem digital pendukung bagi satuan kerja.

Kata Kunci: Inovasi Keuangan Pemerintah, Kartu Kredit Pemerintah, Adopsi Inovasi, Difusi Inovasi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.3156>

*Correspondence: Dian Pramudita Sari

Email: dianpdt99@gmail.com

Received: 27-08-2025

Accepted: 27-09-2025

Published: 27-10-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the adoption of government financial innovation through the use of Government Credit Cards (KKP) in the implementation of work unit expenditures in the Padang KPPN work area. The background of this study is the still low level of KKP adoption, characterized by the suboptimal adoption of KKP as a means of payment through the use of Reserve Money (UP). This study uses a descriptive qualitative approach with five work units as research objects, consisting of three work units that have used KKP and two work units that have not adopted KKP. Data were obtained through interviews and documentation, then analyzed using the diffusion of innovation theory from Everett M. Rogers (2003) with a focus on the characteristics of innovation, namely *relative advantages*, *compatibility*, *complexity*, *trialability* *observability*. The results of the study indicate that the level of KKP adoption in the Padang KPPN environment still varies. Work units that have adopted KKP generally have good leadership support and technical understanding, while work units that have not adopted still experience obstacles in technical aspects and perceptions of procedural complexity. Key supporting factors for adoption include support for socialization and technical guidance from the KPPN (State Treasury Office), policy encouragement, and positive perceptions of work units regarding the ease of the payment process. Meanwhile, inhibiting factors include limited EDC merchants, human resources, organizational culture, budget efficiency, and resistance to the transition from cash to non-cash systems. These findings confirm that the success of KKP adoption is determined not only by formal policies, but also by the readiness of human resources and a supporting digital ecosystem for work units.

Keywords: Government Financial Innovation, Government Credit Card, Innovation Adoption, Innovation Diffusion

Pendahuluan

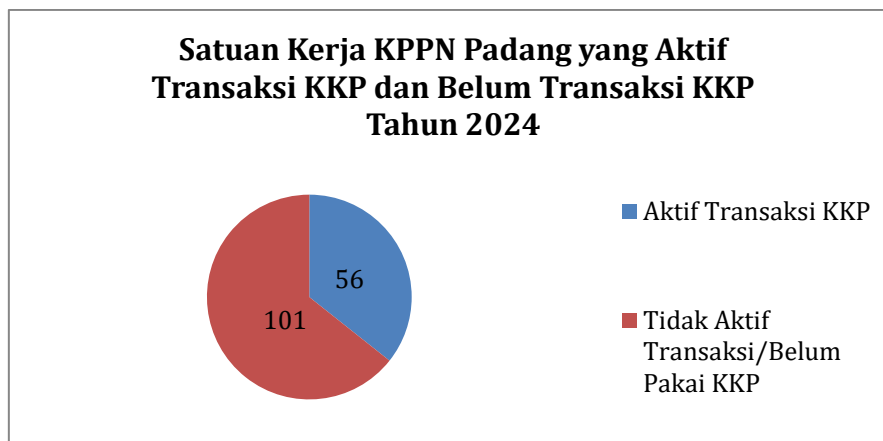
Perkembangan teknologi yang pesat pada era digital saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran di sektor keuangan. Pergeseran dari transaksi tunai menuju sistem pembayaran non-tunai (*cashless*) menjadi fenomena global bagian dari arus transformasi digital yang semakin menguat di Indonesia. Kemudahan akses terhadap layanan transaksi digital seperti *mobile banking*, *electronic payment*, dan *web banking* mendorong percepatan integrasi keuangan di Indonesia (Pangestika et al., 2025). Melalui pemanfaatan teknologi informasi, berbagai instrumen pembayaran berbasis digital mulai dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Yuvita et al, 2023).

Pergeseran ini tidak hanya terlihat pada sektor komersial, tetapi juga mulai diadopsi oleh sektor publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sistem pembayaran yang efektif memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung kinerja keuangan pemerintah. Sebaliknya, keterlambatan atau inefisiensi dalam sistem pembayaran dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan anggaran dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem pembayaran pemerintah menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan meningkatnya tuntutan efisiensi dan integritas dalam tata kelola anggaran (Mergel et al, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen vital dalam mendukung pembangunan nasional, yang menuntut pengelolaan keuangan negara secara efisien, transparan, dan akuntabel (UU No. 17 Tahun 2003). Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berperan memastikan penyaluran dana APBN berlangsung optimal melalui unit operasionalnya di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (Resiloy et al, 2022). Dalam pelaksanaannya, KPPN menyalurkan dana kepada satuan kerja (satker) melalui dua mekanisme, yaitu pembayaran langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Mekanisme UP memberi keleluasaan satker membiayai kegiatan operasional, namun praktik di lapangan sering kali menimbulkan inefisiensi berupa keterlambatan pertanggungjawaban dan *idle cash* (Yulianti & Nurhazana, 2021).

Sebagai upaya reformasi birokrasi dan efisiensi transaksi keuangan negara, pemerintah memperkenalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui PMK No. 196/PMK.05/2018 yang diperbarui PMK No. 97/PMK.05/ 2021. Kebijakan ini merupakan bentuk inovasi sistem pembayaran non-tunai untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meningkatkan transparansi keuangan. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa KKP perlu dimanfaatkan sebagai salah satu metode pembayaran untuk belanja APBN, sebagai wujud dari penerapan inovasi strategis dalam program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan oleh Kementerian Keuangan (Akhmadi et al, 2023). Melalui KKP, pembayaran belanja APBN dilakukan langsung melalui bank penerbit, sementara satker melunasinya secara berkala. Secara konseptual, KKP diharapkan mampu menekan risiko penyelewengan, mempercepat transaksi, serta memperkuat akuntabilitas bendahara.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2018, implementasi KKP telah berkembang diberbagai satker kementerian/lembaga, termasuk di KPPN Padang. Namun, implementasi KKP di lapangan belum optimal. Berdasarkan data KPPN Padang tahun 2024, dari 157 jumlah satuan kerja yang memiliki mekanisme UP dengan KKP, dan dari jumlah tersebut hanya 56 satker yang aktif bertransaksi menggunakan KKP.



Gambar 1. Jumlah Satuan Kerja KPPN Padang yang telah mengadopsi KKP Tahun 2024

Sumber : Data Monitoring KPPN Padang 2024

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti Wijayanti, (2020), Biswan & Adiswastika, (2024), dan Akhmadi et al, (2023), telah membahas efektivitas dan literasi penggunaan KKP dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, kajian tersebut lebih menekankan aspek kebijakan dan sosialisasi, belum menganalisis secara mendalam proses dan faktor-faktor adopsi inovasi dari perspektif pengguna yaitu satker. Sementara itu, penelitian Wibowo, (2019) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan inovasi di sektor publik sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap karakteristik inovasi sebagaimana dijelaskan oleh teori Difusi Inovasi Rogers (2003).

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami rendahnya tingkat adopsi KKP melalui pendekatan teori Difusi Inovasi, khususnya terkait bagaimana karakteristik inovasi (*Relative Advantages, Compatibility, Complexity, Triability Observability*) memengaruhi keputusan adopsi oleh satuan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsinya pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus untuk menggambarkan dan menganalisis adopsi inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja di wilayah KPPN Padang (Hardani & Dkk, 2023). Penelitian ini dilakukan di KPPN Padang serta 5 satuan kerja dengan kategori 3 satker telah menggunakan KKP dan 2 satker belum menggunakan KKP. Pemilihan satker didasarkan dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, (2020) *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan

seperti pengambilan sampel berdasarkan kualifikasi tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dari penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur bersama pihak KPPN Padang, Kasi Manajemen Satker, Kasi Bank, Kabag Umum, dan Bendahara dari 5 satker. Untuk memastikan kredibilitas data dilakukan triangulasi data, dan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan berdasarkan model interaktif dari (Miles & Huberman, 1994) utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan lima satker di wilayah bayar KPPN Padang yang berada di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, tiga satker telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), sedangkan dua satker belum menggunakan KKP. Pemilihan satker dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik, seperti variasi besaran Uang Persediaan (UP) dan tingkat keaktifan transaksi. Adapun satker tersebut diklasifikasikan pada tabel 1.1 dan realisasi transaksi penggunaan KKP pada tabel 1, 2, 3, 4.

Tabel 1. Klasifikasi Satuan Kerja Yang Sudah dan Belum Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

No	Nama Satker	Status Adopsi
1.	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Menggunakan KKP sejak 2023
2.	Balai Diklat Industri Padang	Menggunakan KKP sejak 2021
3.	Radio Republik Indonesia (RRI) Padang	Menggunakan KKP sejak 2024
4.	Balai Perlindungan dan Pelayananan Pekerja Imigran (BP3MI) Sumatera Barat	Belum menggunakan KKP
5.	KPU Provinsi Sumatera Barat	Pernah menggunakan ditahun 2021 namun tidak aktif bertransaksi/ memutuskan berhenti menggunakan.

Sumber: diolah peneliti

Tabel 2. Realisasi Transaksi Satker 1

Tahun	Nama Satker	Realisasi Transaksi KKP (Rp)	Jumlah Transaksi
2023	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Rp 224,458,041	18x
2024	Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Rp 661,804,251	45x

Sumber : Data Sekunder KPPN Padang. Diolah peneliti, 2025

Tabel 3. Realisasi Transaksi Satker 2

Tahun	Nama Satker	Realisasi Transaksi KKP (Rp)	Jumlah Transaksi
2021	Balai Diklat Industri Padang	Rp 226,139,458	20x
2022	Balai Diklat Industri Padang	Rp 494,985,201	32x

Tahun	Nama Satker	Realisasi Transaksi KKP (Rp)	Jumlah Transaksi
2023	Balai Diklat Industri Padang	Rp 215,986,706	10x
2024	Balai Diklat Industri Padang	Rp 58,113,985	4x

Sumber : Data Sekunder KPPN Padang, Diolah Peneliti 2025

Tabel 4. Realisasi Transaksi Satker 3

Tahun	Nama Satker	Realisasi Transaksi KKP (Rp)	Jumlah Transaksi
2024	RRI Padang	Rp 46,446,437	13x

Sumber: Data sekunder KPPN Padang, data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan data realisasi penggunaan KKP dari ketiga satuan kerja, yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Balai Diklat Industri, dan RRI Padang telah memperlihatkan penerapan KKP sebagai instrumen belanja dengan baik, meskipun tingkat pemanfaatannya berbeda-beda. Jika dibandingkan antara ketiga satuan kerja tersebut, terlihat bahwa proses adopsinya tidak seragam. Balai Diklat Industri menjadi pelopor awal (2021), diikuti oleh Bawaslu (2023), dan RRI Padang (2024). Ketiganya menunjukkan kecenderungan adopsi atas dasar dorongan kebijakan dan keunggulan inovasi, namun tingkat optimalisasi berbeda tergantung pada karakteristik belanja, kesiapan infrastruktur digital, dan dukungan pimpinan di masing-masing instansi. Bawaslu Provinsi Sumbar dan Balai Diklat Industri Padang telah menunjukkan penggunaan yang relatif aktif, sementara RRI Padang masih dalam tahap penyesuaian. Semua satuan kerja menyadari bahwa KKP membawa manfaat terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, namun kendala terletak pada aspek teknis dan persepsi pengguna yang masih menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi adopsi inovasi ini.

Sebagai sebuah inovasi kebijakan publik, efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sangat bergantung pada sejauh mana satuan kerja mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem pembayaran tersebut. Menurut Everett M. Rogers (2003) dalam teori *Diffusion of Innovations*, proses penerimaan dan penggunaan inovasi dipengaruhi oleh lima karakteristik utama, yaitu *relative advantage* (keunggulan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (kemudahan diamati). Kelima atribut tersebut menjelaskan bahwa inovasi akan lebih mudah diadopsi apabila dipersepsikan memberikan manfaat yang nyata, sesuai dengan kebutuhan organisasi, tidak terlalu rumit untuk digunakan, dapat diuji coba terlebih dahulu, serta hasilnya dapat diamati secara langsung. Dalam penelitian ini, bagaimana penerimaan satker terhadap inovasi KKP, dianalisis melalui lima indikator dari teori (Rogers, 2003).

1) Keunggulan Relatif (*Relative Advantages*)

Hasil temuan menunjukkan, pelaksanaan inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) menunjukkan adanya keunggulan relatif yang dirasakan secara nyata oleh satker) pengguna. Ketiga satker yang telah mengadopsi KKP memiliki pandangan serupa bahwa

inovasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi, khususnya dalam pembayaran perjalanan dinas tanpa perlu menunggu pencairan uang persediaan (UP) oleh bendahara. Selain itu, pembayaran operasional melalui mesin EDC juga dinilai mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Dari sisi keamanan dan akuntabilitas, penggunaan KKP turut meminimalkan risiko kehilangan uang tunai serta menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Manfaat lain yang dirasakan adalah kemudahan dalam proses pertanggungjawaban pajak, karena transaksi melalui KKP tidak dikenakan pemungutan pajak.

Temuan ini memperkuat bahwa persepsi positif terhadap keunggulan relatif menjadi faktor penting dalam mendorong keputusan adopsi KKP di tingkat satker. Hal ini sejalan dengan teori Difusi Inovasi Rogers (2003) yang menyatakan bahwa keunggulan relatif menggambarkan sejauh mana suatu inovasi dipandang lebih baik dibandingkan dengan cara atau sistem sebelumnya. Inovasi yang menawarkan manfaat nyata akan lebih cepat diadopsi oleh penggunanya. Pandangan ini juga didukung oleh Suwarno (2008), yang menekankan bahwa nilai tambah suatu inovasi dapat dilihat dari aspek kemudahan, kepraktisan, dan efisiensinya. Sementara itu, Call dan Herber (2022) menambahkan bahwa keunggulan inovasi tidak hanya diukur dari manfaat ekonomi, tetapi juga dari nilai sosial, kenyamanan, dan transparansi yang dihasilkannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keunggulan relatif menjadi salah satu faktor kunci yang memperkuat penerimaan dan keberlanjutan penggunaan KKP oleh satker pengguna, sekaligus menunjukkan bahwa inovasi ini berpotensi mempercepat transformasi sistem pembayaran pemerintah menuju mekanisme non-tunai yang lebih modern dan akuntabel.

2. Kesesuaian (*compatibility*).

Hasil temuan menunjukkan, tingkat kesesuaian (*compatibility*) KKP menunjukkan pola yang beragam di antara satuan kerja. Menurut Rogers (2003), inovasi akan lebih mudah diterima apabila dianggap sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan penggunanya. Semakin sesuai suatu inovasi dengan sistem dan kebiasaan yang telah ada, maka semakin besar kemungkinan inovasi tersebut diadopsi tanpa menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Suwarno (2008), bahwa inovasi yang kompatibel dengan tata kerja dan sistem yang telah berjalan akan lebih cepat diterima karena tidak memaksa perubahan drastis dalam praktik pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sistem dan tata kelola, KKP dinilai cukup selaras dengan regulasi dan kebijakan keuangan digital pemerintah seperti SPAN, OMSPAN, dan CMS. Namun, tingkat kesesuaian secara operasional masih terbatas. Ketiga satuan kerja pengguna KKP, yaitu Bawaslu, Balai Diklat Industri, dan RRI Padang, menilai bahwa KKP sesuai untuk kegiatan perjalanan dinas dan transaksi digital, tetapi belum sepenuhnya cocok untuk belanja rutin pada toko kecil yang belum memiliki fasilitas EDC. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian operasional KKP masih dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur serta kesiapan penyedia barang dan jasa. Sementara itu, dua satker nonpengguna menilai bahwa KKP belum sesuai dengan pola kerja dan kebutuhan

organisasi mereka yang cenderung berbasis kontrak serta kegiatan lapangan, yang tidak memungkinkan pembayaran melalui mekanisme kartu kredit. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesesuaian inovasi berbeda tergantung pada karakteristik organisasi dan jenis belanja yang dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara administratif dan sistemik, KKP memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan arah digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Namun, secara operasional, masih terdapat keterbatasan dalam penerapannya di lapangan. Variasi tingkat kesesuaian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan adopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh konteks organisasi dan kesiapan lingkungan tempat inovasi diterapkan.

3. Kerumitan (*complexity*)

Tingkat kerumitan (*complexity*) dalam penerapan KKP menunjukkan variasi persepsi di antara satuan kerja. Menurut Rogers (2003), *complexity* menggambarkan sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit dipahami atau digunakan oleh calon penggunanya. Semakin tinggi tingkat kerumitan suatu inovasi, maka semakin lambat proses adopsinya. Hasil temuan, diketahui bahwa kerumitan dalam penerapan KKP tidak sepenuhnya bersumber dari sistem teknologinya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-teknis seperti kebiasaan kerja manual, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti ketersediaan mesin EDC di lapangan. Pada tahap awal implementasi, sebagian satuan kerja mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme transaksi, pelaporan, dan proses rekonsiliasi tagihan dengan pihak bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap inovasi baru membutuhkan masa transisi bagi pengguna untuk beradaptasi dan memahami sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, tingkat kerumitan dalam penggunaan KKP dapat dikategorikan sebagai kerumitan transisional, bukan hambatan permanen. Artinya, seiring dengan peningkatan pengalaman dan dukungan teknis, persepsi terhadap kerumitan cenderung berkurang.

Sementara itu, satker yang belum mengadopsi KKP memandang sistem ini masih terlalu rumit karena memerlukan fasilitas tambahan dan koordinasi intensif dengan pihak bank. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesiapan antar satuan kerja, baik dari sisi infrastruktur maupun kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis, bimbingan penggunaan aplikasi, serta perluasan fasilitas pendukung seperti EDC menjadi langkah penting untuk mempercepat proses adaptasi dan mengurangi persepsi kerumitan terhadap KKP.

4. *Triability* (Kemungkinan dicoba)

Hasil temuan, aspek *trialability* tercermin melalui strategi yang diterapkan KPPN dalam memperkenalkan KKP. KPPN tidak langsung mewajibkan seluruh satuan kerja untuk menggunakan KKP pada seluruh jenis belanja, melainkan memberikan kesempatan uji coba terbatas melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan. Pada tahap awal, satuan kerja diarahkan untuk mencoba KKP pada transaksi kecil seperti perjalanan dinas. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan pandangan Rogers (2003), bahwa

uji coba terbatas dapat mempercepat peralihan dari tahap persuasi menuju keputusan dalam proses adopsi inovasi.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa strategi tersebut efektif dalam membangun kepercayaan pengguna. Satker seperti Balai Diklat Industri Padang, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan RRI Padang mengungkapkan bahwa mereka awalnya hanya mencoba KKP untuk transaksi sederhana, namun setelah merasa nyaman dan memahami manfaatnya, penggunaan KKP diperluas ke berbagai kegiatan operasional lainnya. Sebaliknya, satker yang tidak mendapat kesempatan untuk uji coba cenderung menolak atau menghentikan penggunaan KKP karena pengalaman awal yang kurang baik serta keterbatasan fasilitas pendukung.

Dengan demikian, tingkat *trialability* terbukti berperan penting dalam keberhasilan adopsi KKP di lingkungan satuan kerja. Semakin besar kesempatan yang diberikan untuk melakukan uji coba, semakin tinggi pula tingkat penerimaan dan kesiapan satuan kerja dalam mengimplementasikan inovasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Premkumar dan King (1994) yang menegaskan bahwa keterlibatan pengguna dalam tahap uji coba dapat menurunkan persepsi risiko serta meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam mengadopsi teknologi baru.

5. *Observability* (Kemudahan Diamati)

Temuan penelitian, bagi satker pengguna, manfaat KKP dapat diamati secara nyata melalui percepatan proses pelaporan, peningkatan transparansi transaksi, serta kemudahan dalam pelaporan dan pemungutan pajak. Perubahan ini dirasakan signifikan karena sistem transaksi dengan KKP mencatat setiap pengeluaran secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah. Kondisi tersebut memperkuat persepsi positif terhadap inovasi sekaligus meningkatkan kepercayaan institusional terhadap sistem pembayaran digital yang lebih akuntabel. Sebaliknya, bagi satuan kerja yang belum menggunakan atau sempat menghentikan penggunaan KKP, tingkat *observability* masih rendah. Mereka hanya mengetahui manfaat KKP secara konseptual tanpa pengalaman langsung yang memadai untuk menilai efektivitasnya. Minimnya kesempatan untuk mengamati hasil secara empiris membuat motivasi untuk mengadopsi inovasi ini menjadi terbatas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Rogers (2003) bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan suatu inovasi untuk diamati manfaatnya, maka semakin besar pula kemungkinan inovasi tersebut diterima dan diadopsi. Dalam konteks KKP, *observability* berperan sebagai penguat persepsi positif dan pendorong penyebaran inovasi antar satuan kerja di lingkungan KPPN Padang.

Proses Adopsi Inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Satuan Kerja di KPPN Padang

Proses penyebaran informasi mengenai inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada satker di KPPN Padang menghasilkan respon yang beragam. Sebagian satker telah memahami dan menerapkan KKP, sementara lainnya masih menunda adopsi dikarenakan adanya kendala teknis maupun persepsi manfaat yang belum jelas bagi mereka. Menurut Rogers (2003), proses keputusan adopsi inovasi berlangsung melalui lima tahapan. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa kelima tahapan tersebut berlangsung dengan tingkat kemajuan yang berbeda antara satuan kerja yang telah menggunakan KKP dan yang belum.

1. Tahap Pengetahuan (*Knowledge*)

Seluruh satuan kerja dalam lingkup KPPN Padang telah mengetahui adanya kebijakan KKP melalui surat edaran dan sosialisasi Kementerian Keuangan. Namun, tingkat pemahaman berbeda antar satker. Tiga satker yang sudah mengadopsi KKP memperoleh pemahaman lebih komprehensif karena mendapat bimbingan teknis langsung dari KPPN, sedangkan dua satker non-adopter hanya sebatas mengetahui kewajiban tanpa memahami prosedur penggunaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa diseminasi informasi inovasi belum merata. Dalam teori Rogers (2003), tahap pengetahuan merupakan pintu awal yang menentukan keberhasilan tahap berikutnya. Ketika informasi tidak sepenuhnya tersampaikan, maka resistensi terhadap inovasi cenderung muncul di tahap-tahap selanjutnya.

2. Tahap Persuasi (*Persuasion*)

Pada tahap ini, perbedaan respon mulai terlihat. Satker pengguna KKP menunjukkan sikap positif karena menilai sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Sebaliknya, satker non-pengguna menilai KKP menambah beban administratif dan memperumit tanggung jawab bendahara. Temuan ini menggambarkan perbedaan persepsi terhadap dua atribut utama inovasi, yaitu *relative advantage* dan *complexity*. Rogers (2003), menegaskan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan merupakan determinan utama pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam konteks ini, persepsi negatif terhadap kerumitan sistem menjadi faktor awal munculnya resistensi.

3. Tahap Keputusan (*Decision*)

Berdasarkan temuan lapangan tiga satker yang telah mengadopsi KKP memutuskan untuk menggunakan setelah menerima dorongan dari pimpinan dan arahan langsung dari KPPN. Keputusan ini lebih bersifat *top-down* daripada inisiatif individu/organisasi. Dua satker lainnya belum mengambil keputusan untuk menggunakan karena keraguan terhadap kesiapan SDM dan sistem akuntabilitas internal. Tahap keputusan di lingkungan birokrasi cenderung dipengaruhi oleh faktor struktural dan regulatif, bukan murni sikap individu. Ini sejalan dengan teori Rogers (2003), bahwa dalam organisasi, proses adopsi inovasi lebih kompleks karena melibatkan koordinasi antarunit dan pengaruh otoritas formal.

4. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Berdasarkan hasil temuan ketiga satker yang telah mengadopsi KKP sudah menggunakannya untuk pengeluaran perjalanan dinas dan belanja operasional. Meski demikian, penggunaan KKP belum optimal karena masih ada transaksi yang dilakukan secara tunai. Kendala utama muncul pada pelaporan transaksi melalui sistem digital, ketersediaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), serta belum seluruh *merchant* toko

available dengan pembayaran melalui KKP. Implementasi ini menunjukkan bahwa adopsi KKP sudah berjalan, namun masih bersifat parsial. Dalam teori Rogers (2003), tahap implementasi merupakan fase di mana pengguna mulai menyesuaikan sistem kerja dengan inovasi. Hambatan teknis ditahap ini menandakan perlunya dukungan kelembagaan dan pelatihan lanjutan.

5. Tahap Konfirmasi (*Confirmation*)

Satker yang telah menggunakan KKP pada umumnya merasa puas dengan manfaat yang diperoleh dan berkomitmen melanjutkan penggunaan. Sebaliknya, satker yang belum mengadopsi masih menunggu bukti nyata dari keberhasilan satker lain. Artinya, inovasi KKP di KPPN Padang belum mencapai tahap konfirmasi kolektif. Efek penularan (*observability*) masih lemah karena belum cukup banyak contoh nyata yang dapat dijadikan acuan oleh satker lain. Menurut Rogers (2003), tahap konfirmasi memerlukan pembuktian sosial yang kuat agar adopsi menjadi kebiasaan baru (*institutionalized innovation*).

Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Adopsi Inovasi Kartu Kredit Pemerintah oleh Satuan Kerja KPPN Padang

Berdasarkan temuan hasil wawancara penelitian dengan pihak KPPN Padang dan lima satuan kerja di wilayah kerjanya, ditemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi tingkat adopsi inovasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

a. Faktor Pendukung Adopsi KKP

1. Dorongan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Kementerian Keuangan melalui PMK No. 196/PMK.05/2018 memberikan legitimasi formal sekaligus dorongan yang bersifat *top-down* bagi satuan kerja untuk beralih dari sistem tunai ke sistem pembayaran digital. Kebijakan ini memperkuat pandangan bahwa KKP bukan sekadar alat pembayaran baru, melainkan bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi perbendaharaan negara.

2. Sosialisasi dan Pendampingan dari KPPN

Peran aktif KPPN Padang berfungsi sebagai fasilitator dan katalis perubahan organisasi. KPPN tidak hanya bertindak sebagai penyalur kebijakan, tetapi juga melakukan sosialisasi, pendampingan teknis, monitoring, dan evaluasi rutin untuk memastikan satker memahami serta mampu mengoperasikan KKP. Pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan membantu membangun trust dan meningkatkan literasi digital di kalangan bendahara.

3. Persepsi positif tentang keunggulan

Persepsi positif terhadap keunggulan relatif (*relative advantage*) menjadi faktor kunci keberhasilan adopsi. Para bendahara satker menilai KKP membawa manfaat langsung berupa efisiensi waktu, kemudahan pelaporan, peningkatan akuntabilitas, dan transparansi transaksi. KKP dinilai mempermudah proses pembayaran perjalanan dinas, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, serta mempercepat pelaporan karena transaksi terekam otomatis.

b. Faktor Penghambat Adopsi KKP

1. Hambatan Teknis

Bersumber dari keterbatasan infrastruktur pembayaran digital, khususnya ketersediaan mesin EDC di toko, hotel, atau penyedia jasa di daerah. Kondisi geografis aktivitas kerja dan yang meliputi daerah luar kota seperti Dharmasraya, Pasaman, dan Mentawai menyebabkan tidak semua penyedia jasa memiliki fasilitas gesek kartu, sehingga transaksi KKP menjadi terbatas. Serta masih rendahnya tingkat digitalisasi keuangan di Kota Padang.

2. Budaya Organisasi

Resistensi budaya organisasi dan kebiasaan administratif lama juga menjadi penghalang signifikan. Temuan dari satker yang merasa sistem KKP lebih rumit dibandingkan mekanisme tunai, karena belum terbiasa dengan sistem digital dan menganggap prosedur pelaporan ganda (UP tunai dan UP KKP) lebih menyulitkan. Kebiasaan kerja manual membuat sebagian satker enggan beralih sepenuhnya ke metode non-tunai melalui KKP. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Marwanto, I. G. H., & Yap, N. (2020), resistensi terhadap perubahan dari internal organisasi juga merupakan hal yang sering dihadapi, dan hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan sepenuhnya proses inovasi dalam pengelolaan keuangan publik.

3. Sumberdaya Manusia

Keterkaitan kartu KKP pada nama pejabat tertentu, kemudian pemegang kartu yang berpindah jabatan atau mutasi, menyebabkan proses penerbitan ulang kartu memakan waktu lama. Selain itu, struktur belanja satker yang berbasis kontraktual (LS) juga membuat sebagian satker merasa KKP kurang relevan, karena sebagian besar pengeluaran tidak dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.

4. Efisiensi Anggaran

Faktor penghambat terakhir berasal dari efisiensi anggaran dan volume belanja. Saat terjadi kebijakan efisiensi seperti pada tahun 2024, intensitas perjalanan dinas dan belanja operasional menurun, sehingga penggunaan KKP otomatis berkurang.

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan KPPN Padang berjalan belum optimal. Dari lima satuan kerja yang diteliti, tiga telah mengadopsi dengan tingkat penggunaan berbeda, sedangkan dua lainnya belum menggunakan karena keterbatasan fasilitas dan kesiapan sumber daya. Berdasarkan teori *Diffusion of Innovations* Rogers (2003), keberhasilan adopsi dipengaruhi oleh keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, uji coba, dan kemudahan diamati. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Secara keseluruhan, KKP memiliki potensi besar dalam mewujudkan sistem keuangan pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel jika didukung dengan strategi penerapan yang adaptif dan berkelanjutan. KPPN Padang telah berperan aktif melalui sosialisasi dan pendampingan, namun tantangan seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur pembayaran yang

terbatas, dan resistensi budaya organisasi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, KPPN Padang disarankan untuk memperkuat pelatihan dan pendampingan teknis bagi bendahara satuan kerja, memperluas kerja sama dengan penyedia barang/jasa yang menerima KKP, serta membangun forum berbagi pengalaman antara satker pengguna dan nonpengguna guna meningkatkan visibilitas manfaat KKP.

Secara akademis, penelitian ini memperluas penerapan teori Difusi Inovasi dalam konteks kebijakan keuangan publik dengan menyoroti peran persepsi pengguna dalam menentukan keberhasilan implementasi inovasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan menggunakan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara lebih spesifik pengaruh masing-masing dimensi inovasi terhadap tingkat adopsi KKP di instansi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 26–45. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172>
- Biswan, A. T., & Adiswastika, S. (2024). Kartu Kredit Pemerintah: Inovasi dan Dukungan Pengembangan Transaksi Berbasis Digital. *Jurnal USAHA*, 5(1), 82–93. <https://doi.org/10.30998/juuk.v5i1.2901>
- Call, D. R., & Herber, D. R. (2022). Applicability of the diffusion of innovation theory to accelerate model-based systems engineering adoption. *Systems Engineering*, 25(6), 574–583. <https://doi.org/10.1002/sys.21638>
- Hardaniet al. (2023). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Pangestika, Z. N., Putri, D. K., Angelica, S. F., & Nihayah, D. M. (2025). Systematic Literature Review: Persepsi Penggunaan Qris Sebagai Peningkatan Efektivitas Alat Pembayaran Dan Sistem Keuangan Digital. 13(2), 103–115.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Premkumar, G. & King, W. R. (1994) Organizational Characteristics and Information Systems Planning: An Empirical Study. *Information Systems Research* 5(2):75-109. <https://doi.org/10.1287/isre.5.2.75>

- Resiloy, U. D. A., Aprili, W., & Solong, I. P. (2022). Pengelompokan Satuan Kerja Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan Analisis Cluster K-Means (Studi Kasus: Kppn Ambon Tahun 2021). *VARIANCE: Journal of Statistics and Its Applications*, 3(2), 91–98. <https://doi.org/10.30598/variancevol3iss2page91-98>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovation* (5th ed.). The Free Press.
- Rogers, E. M., Singhal, A. & Quinlan, M. M. (2019). *Diffusion of Innovations, An Integrated Approach to Communication Theory and Research*, Third Edition. <https://doi.org/10.4324/9780203710753-35>
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* , 10(1), 1171–1181.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. In STIA LAN.
- Triagita, A., Apriani, N., Yudanto, D. W., & Lutfiah, Z. N. (2024). Analisis Dampak Penggunaan Transaksi Non Tunai (Cashless) Terhadap Pertumbuhan UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 876–885.
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 4 Tentang Keuangan Negara
- Wibowo, I. T. (2019). Proses Difusi Inovasi Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti): Studi Kasus Pada DitjenPerbendaharaan Di D.I. Yogyakarta Tahun 2018. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4, 323–337.
- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. 20(Oktober), 1–9.
- Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3(Desember), 56–74. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art5>
- Yuvita, Ibadurrahman, & Abdulk Hafid. (2023). Efektivitas Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar. *ECo-Buss*, 6(2), 870–881.